



LOKAKARYA MULTIKULTURALISME DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

AKAAN

**Direktorat
udayaan**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bali, Agustus 2009**

Tim Kerja :

Sri Rahayu Budiarti

Farid

M. Alimuddin

Rr. Wirastri Handayani

Muslimin A.R. Effendy

Titik Umi Kurniawati

Rahmania

Ganda Manullang

Sri Suharni

Sugiyanto

Siti Muninggar

Nurokhim

Kata Pengantar

Parekh, proponen teori multikulturalisme dalam bukunya *Rethinking Multiculturalism* (2001) merekomendasikan pemahaman multikulturalisme bukan sebagai sebuah doktrin politik dengan muatan pragmatik, tidak pula sebagai sebuah aliran filsafat dengan teori yang khas tentang tempat manusia di dunia, melainkan lebih sebagai sebuah perspektif atau cara melihat kehidupan manusia yang menghargai pluralitas kebudayaan, dan cara merespons pluralitas itu.

Bagi Indonesia, bangsa yang tergolong masih relatif muda, harus berjuang terlebih dahulu dengan gagasan nasionalisme. Budi Utomo misalnya, tampil sebagai organisasi "pemula" dalam kesadaran kolektif bangsa, terutama bagi "kemajuan bangsa Jawa". Bukankah kelahiran Budi Utomo adalah sebuah *event*, peristiwa yang disengaja terjadi di tengah-tengah masyarakat yang "belum maju?" Budi Utomo bukan sekadar lontaran pemikiran tetapi sebuah peristiwa yang diwujudkan dalam suatu konteks struktural tertentu. Maka ketika hari kelahirannya dijadikan sebagai "Hari Kebangkitan Nasional" di tahun 1948, secara eksplisit negara yang sedang memperjuangkan eksistensinya itu ingin mengatakan bahwa perjuangan mendapatkan kemerdekaan bangsa sesungguhnya telah bermula sejak 40 tahun yang lalu (1908).

Alur pikiran yang sejalan dengan itu juga bisa dilihat dengan pilihan "Sumpah Pemuda" (1928) sebagai perwujudan dari sebuah peristiwa yang besar, yaitu organisasi-organisasi pemuda terpelajar mengadakan "kongres pemuda" sebagai sebuah pengakuan fundamental akan kebersatuan dalam berbangsa, bertanah air dan berbahasa Indonesia. Penafsiran atas nasionalisme Indonesia ini selayaknya juga memberi dasar bagi sebuah kesadaran kolektif untuk mengembangkan dan membangun sebuah pendekatan yang memungkinkan keragaman etnik dan kultural itu justru menjadi kekuatan bangsa untuk melanjutkan pencapaian cita-citanya. Bukankah para pendiri bangsa percaya bahwa sebuah negeri yang amat majemuk hanya mungkin dipersatukan dengan ikrar yang meneguhkan persatuan sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik?

Lokakarya ini dilaksanakan untuk memberi jawaban atas permasalahan multikulturalisme yang dihadapi bangsa dewasa ini. Terutama munculnya fenomena ketegangan antar kelompok menyangkut perbedaan haluan politik dalam pesta demokrasi, memudarnya nilai-nilai demokrasi lokal,

kurikulum pendidikan yang kurang mengembangkan model pendekatan multikulturalisme, dan beragam masalah yang selalu muncul dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu forum ini menjadi sebuah alternatif untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terutama dari para akademisi, pemerhati budaya, dan aktivis LSM menyangkut model kebijakan multikultural yang dapat dikembangkan di Indonesia sehingga menjadi bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Menteri dalam rangka pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam bidang multikulturalisme.

Kegiatan di Bali ini merupakan lokakarya pertama yang kami laksanakan tahun 2009. Pada tanggal 12 Agustus nanti kegiatan yang sama akan diadakan di Jogjakarta. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga lokakarya ini dapat berjalan sukses. Kepada pembicara kunci, narasumber, dan pemakalah terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu, menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti lokakarya ini. Akhirnya kepada pimpinan BPSNT Bali beserta staf terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Panitia

SAMBUTAN STAF AHLI MENTERI BIDANG MULTIKULTURAL DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Ass wr. wb.

Hadirin yang saya hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan Lokakarya Multikulturalisme Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Kegiatan ini merupakan program kerja Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009. Sebagai Staf Ahli Menteri saya mempunyai tugas untuk memberikan telaaahan kepada Menteri mengenai masalah multikultural, dan forum ini adalah salah satu upaya kami untuk mengumpulkan berbagai gagasan dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan Menteri untuk pengembangan multikulturalisme di Indonesia.

Peserta Lokakarya yang berbahagia,

Perkenankan saya untuk memberikan sedikit pandangan menyangkut multikulturalisme ini. Dalam upaya membangun masa depan bangsa, multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebagai sebuah ideologi yang harus diperjuangkan dan diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Pertama, bahwa manusia terikat secara kultural (*culturally embeded*) dalam arti bahwa mereka tumbuh dan hidup dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultural, dan bahwa mereka menjalankan kehidupan dan relasi-relasi sosialnya dalam kerangka sistem makna dan pemaknaan yang diturunkan secara kultural. Kedua, budaya yang berbeda merepresentasikan sistem makna dan visi tentang kehidupan yang baik yang juga berbeda. Karena masing-masing menyadari keterbatasan kapasitas dan emosi yang hanya mampu menangkap sebagian saja dari totalitas eksistensinya. Ia membutuhkan budaya-budaya lain membantu memahami dirinya secara lebih baik, mengembangkan cakrawala intelektualnya, merentangkan imajinasi, dan menyelematkannya dari narsisme untuk menjaganya dari godaan untuk mengabsolutkan diri, dan, ketiga, setiap budaya secara internal bersifat plural, dan merefleksikan sebuah perbincangan/dialog yang kontinu di antara tradisi dan jalinan pemikiran yang berbeda. Ini bukan berarti bahwa ia tidak memiliki koherensi dan identitas, tapi bahwa identitasnya itu plural, cair dan terbuka.

Mempromosikan multikulturalisme, bukan sekadar langkah menyuguhkan warna-warni identitas. Tetapi, pertama-tama, membangun kesadaran tentang pentingnya kelompok etnis dan budaya itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dalam ruang bersama. Inti dari pendekatan ini terletak pada usaha yang lebih sistematis untuk menyertakan pendekatan struktural politik dan ekonomi dalam proses itu. Ini berarti bahwa multikulturalisme membutuhkan pengintegrasian pendekatan lainnya selain budaya untuk memungkinkan tema-tema yang relevan di sekitar keadilan dan persamaan dapat menjadi faktor yang ikut memperkuat multikulturalisme. Oleh karena itu ada tiga strategi dasar untuk mensosialisasikan dan mengembangkan multikulturalisme :

Pertama, pendidikan. Sosialisasi dan diseminasi multikulturalisme melalui lembaga pendidikan dan jika mungkin ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan, bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa".

Kedua, kebijakan pemerintah. Adanya regulasi dan kebijakan yang memberi jaminan akan adanya kebersamaan dalam tata negara berdasarkan prinsip multikulturalisme.

Ketiga, peran media. Yang dapat dilakukan oleh media adalah menunjukkan bagaimana masyarakat harus menghadapi perbedaan, melawan stereotipe suku atau etnis tertentu dan memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Menunjukkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda serta menolak pertikaian antar pemeluk agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Diharapkan dengan tiga strategi dasar tersebut konflik-konflik di berbagai daerah yang masih terjadi sampai saat ini dapat diantisipasi dan dicegah sedini mungkin. Semoga lokakarya ini dapat menghasilkan pemikiran dan terobosan-terobosan agar setiap warga negara dapat saling mengenal kebudayaan yang berbeda dan dapat hidup bersama secara damai.

Wassalamu' alaikum wr wb

SAM Bidang Multikultural,

DRA. SRI RAHAYU BUDIARTI, MM

**SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Ass wr wb

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Sebagai insan yang bertakwa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti lokakarya tentang multikulturalisme dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Pertama-tama saya menyambut baik dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada para Staf Ahli Menteri yang telah memprakarsai diadakannya lokakarya tentang multikulturalisme di dua tempat yang berbeda, yakni di Bali dan Jogjakarta yang tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Lokakarya ini tentunya mempunyai nilai tersendiri di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan diharapkan dalam pesta demokrasi tentunya ada dinamika yang dapat melahirkan suatu kesadaran baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Hadirin yang saya hormati,

Multikultural pada kenyataannya bukanlah barang baru di Indonesia, ia telah menjadi inspirasi bagi para *founding fathers* dalam merumuskan kebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945.

Masyarakat Indonesia telah lama menjadi masyarakat majemuk (*plural society*) bukan masyarakat homogen (*homogeneous society*), dengan menganut ideologi multikultural. Persoalan yang kita hadapi saat ini, adalah bagaimana konsep tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam perwujudan "kebhinnekaan" untuk mencegah terjadinya dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lain.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai sebuah bangsa yang lahir berdasarkan kesepakatan berbagai suku bangsa untuk bergabung menjadi satu bangsa dalam bingkai NKRI, maka nilai kebangsaan sangat dijunjung tinggi. Keadaan ini menimbulkan terjadinya proses lintas budaya dan silang budaya yang kemudian secara berkelanjutan mempertemukan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga kita bisa mengakui, memahami, dan menghargai serta mengagungkan budaya etnis orang lain yang saling berbeda namun tetap berada dalam kesederajatan.

Diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Indonesia diarahkan untuk meningkatkan ketahanan budaya bagi upaya membentuk watak dan jatidiri menuju bangsa yang bermartabat. Semoga kegiatan ini dapat melahirkan suatu paradigma baru dalam kondisi kekinian.

Demikian harapan-harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini, dan semoga lokakarya ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Lokakarya ini saya buka dengan resmi

Wassalamu' alaikum wr wb

Bali, 5 Agustus 2009

Sekretaris Jenderal,

DRS. WARDIYATMO, M.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Sambutan Staf Ahli Menteri Bidang Multikultur.....	3
Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.....	5
Daftar Isi.....	7
Multikulturalisme Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.....	8
1. Latar Belakang	8
2. Tema	9
3. Tujuan	9
4. Sasaran	9
5. Lingkup Kegiatan	9
6. Output Kegiatan	9
7. Pembicara	10
8. Peserta	10
9. Pelaksana	10
10. Waktu dan Tempat	10
Abstrak Makalah	
● Prof. Dr. I Gde Parimartha, MA.	11
● Prof. Dr. I Nengah Bawa Atmadja	12
● Drs. I. B. G. Pujaastawa, MA.....	14
● Ida Dewa Gde Ngurah Swastha, SH.	16
Profil Pemakalah	18
Tugas Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	24
Jadwal Acara	25

Multikulturalisme Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dibuktikan dengan kondisi alam maupun keragaman budayanya. Dari segi geografi Indonesia memiliki 5 pulau besar, 17.000, lebih pulau kecil, dan lebih dari 500 suku bangsa atau kelompok etnis yang tersebar di seluruh tanah air. Kondisi masyarakat yang majemuk ini merupakan fakta bahwa dibutuhkan suatu pemahaman tentang multikulturalisme, yaitu sebuah keharusan dari setiap komunitas untuk menghormati hak-hak atas keanekaragaman budaya dan hak-hak untuk hidup berbeda sesuai dengan budayanya.

Dengan demikian multikulturalisme merupakan suatu pengakuan atas hak hidup dari budaya-budaya lokal dan oleh sebab itu wajib dihormati. Multikulturalisme bukanlah suatu pandangan yang menutup diri terhadap budaya yang lain, namun mengharuskan adanya dialog dengan budaya lain dengan prinsip kesetaraan. Dialog dan toleransi merupakan pandangan yang esensial dari multikulturalisme (H.A.R. Tilaar, 2005).

Parsudi Suparlan (2005), menulis bahwa acuan bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme bukanlah sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya." Diyakini pula bahwa pemahaman yang baik tentang multikulturalisme dapat mencegah terjadinya konflik antar komunitas yang berbeda.

Berdasarkan hasil berbagai kajian dari para pakar dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia masih memiliki masalah dalam upaya menuju masyarakat Indonesia yang multikultural, dan disarankan agar diadakan berbagai kajian, diskusi atau lokakarya dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta para tokoh politik dan tokoh masyarakat. Diharapkan upaya ini dapat mempercepat proses menuju masyarakat Indonesia yang multikulturalisme

2. Tema

Lokakarya ini akan mengusung tema; "Potret dan Prospek Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia di Bali".

3. Tujuan

- a. Menyatukan konsep multikulturalisme dari para pakar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural
- b. meningkatkan pemahaman lembaga pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat tentang pentingnya multikulturalisme
- c. masukan untuk penyusunan kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam bingkai multikulturalisme

4. Sasaran

- a. Meningkatkan kerjasama antar komunitas yang berbeda secara etnis, agama, budaya, pendidikan dan politik dan sekaligus mencari model resolusi konflik antar kelompok yang bertikai dalam kerangka NKRI
- b. meningkatkan pemahaman lembaga pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat tentang pentingnya multikulturalisme

5. Lingkup Kegiatan

- a. Lokakarya dengan tema: "Potret dan Prospek Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia di Bali."
- b. Analisis dari berbagai masukan untuk pertimbangan penyusunan kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kebudayaan dan pariwisata

6. Output Kegiatan

- a. Meningkatnya kerjasama para pakar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural
- b. Meningkatnya pemahaman lembaga pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat tentang pentingnya multikulturalisme
- c. Bahan masukan dalam penyusunan kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata

7. Pembicara

Pembicara yang tampil dalam kegiatan lokakarya terdiri atas pembicara kunci (*keynote speaker*), narasumber dan pemakalah. Pembicara kunci adalah Prof. Dr. I Gde Parimartha, MA. dengan makalah berjudul "Revitalisasi Kebudayaan Dalam Masyarakat Multikultur: Ajeg Bali Dalam Bingkai NKRI. Sedang narasumber adalah Dr. Risman Musa (Potret dan Prospek Pengembangan Masyarakat Multikultural di Bali), dan pemakalah; Prof. Dr. I Nengah Bawa Atmadja, MA (Demokrasi dan Pemilihan Umum Tanpa Kekerasan: Perspektif Multikulturalisme pada Masyarakat Bali), Drs. I.B.G. Pujaastawa, MA. (Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Bali Dalam Menyikapi Keberagaman), dan, I Dewa Gde Suastha, SH. (Mengelola dan Memanfaatkan Keberagaman Budaya Bali Untuk Pembangunan Pariwisata).

8. Peserta

Lokakarya ini akan diikuti ± 50 peserta yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta, UPT Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

9. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Gedung Sapta Pesona Lt. 12, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta-10110).

10. Waktu dan Tempat

Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2009, di Hotel Puri Dalem Sanur Bali.

Abstrak Makalah

Revitalisasi Kebudayaan Dalam Masyarakat Multikultur: "Ajeg" Bali Dalam Bingkai NKRI

I Gde Parimartha

Kebudayaan Bali merupakan ikon yang memberi daya hidup masyarakat Bali yang semakin majemuk. Masyarakat Bali dengan kebudayaannya yang terutama dijiwai oleh agama Hindu telah mampu memberi semangat yang terus menerus bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan zamannya.

Masyarakat Bali merupakan masyarakat multikultural, dalam arti sejak lama di Bali telah hidup berbagai jenis suku bangsa, atau etnik yang memiliki kebudayaannya masing-masing, meskipun masyarakat etnik Bali merupakan pemilik kebudayaan yang dominan. Penduduk suku Jawa beragama Islam telah masuk ke Bali sejak masa awal masuknya Islam ke Indonesia. Para pedagang Cina, Bugis-Makasar, Minangkabau yang kemudian juga menjadi penduduk Bali telah tinggal di Bali dari masa ke masa. Kemudian orang-orang asing dalam konteks pariwisata juga ada yang tinggal di Bali, hidup berbaur dengan masyarakat Bali. Namun demikian, kebudayaan Bali tetap tumbuh menonjol berinteraksi dengan warna budaya-budaya lain dalam suasana saling menghargai satu sama lain. Tanpa mengabaikan pengaruh kebudayaan luar, Bali tetap hidup dengan kebudayaannya yang unik sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam konteks seperti itu, dapat dipahami bahwa suatu revitalisasi kebudayaan telah terjadi di Bali.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana revitalisasi kebudayaan itu dengan pola-pola interaksi tertentu dapat berlangsung, tanpa adanya suatu gesekan yang menimbulkan perpecahan berarti di dalam masyarakat. Dibukanya Bali dengan pembangunan pariwisata secara besar-besaran, sebaliknya membawa wacana revitalisasi kebudayaan Bali dalam perspektif "Ajeg Bali dalam Bingkai NKRI".

Tampaknya hal itu terjadi tidak lepas dari peranan berbagai nilai kearifan yang dimiliki masyarakat Bali. Selain itu partisipasi masyarakat Bali yang semakin plural, namun tetap dengan semangat kebangsaan Indonesia, juga penting artinya, sehingga revitalisasi kebudayaan Bali memberi daya hidup masyarakat Bali secara keseluruhan.

*Demokrasi dan Pemilihan Umum Tanpa Kekerasan: Perspektif
Multikulturalisme pada Masyarakat Bali*

Nengah Bawa Atmadja

Pemilihan umum, penyelesaian perselisihan secara damai dan pengakuan terhadap keragaman (*plurality*) berasaskan multikulturalisme merupakan nilai dan ciri demokrasi. Secara substansial demokrasi telah dikenal pada desa-desa pakraman di Bali (demokrasi desa). Gejala ini tampak pada praktik sosial, habitus dan doxa pada desa-desa pakraman (*field*). Desa-desa pakraman sebagai sebuah republik kecil dengan aneka organisasi swadaya kolektif yang ada di dalamnya merupakan komponen masyarakat sipil yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Bali yang berkehamonisan dan berkeesejahteraan, berdasarkan ideologi (*doxa*) Tri Hita Karana. Walaupun desa pakraman adalah sebuah republik kecil, namun secara struktural dia tunduk kepada penguasa supradesa, yakni negara. Kepemilikan modal yang lebih besar mengakibatkan elite politik yang mewakili dan atau sebagai personifikasi dari negara, dapat menghegemoni dan mendominasi warga desa pakraman. Karena itu, jika elite politik pada tataran negara (pusat) berkonflik, maka konflik pun menjalar ke daerah, berlanjut ke pinggiran, yakni desa. Gejala ini terlihat pada aneka bentuk kekerasan, misalnya peristiwa G 30 S/PKI (1965), penggolokan (1971), kasus berdarah Desa Banjar Buleleng (1999), kasus berdarah Desa Petandakan Buleleng (2003), dll. Kekerasan tidak hanya sebagai pantulan dari permainan elite politik pada tataran supradesa, tetapi terkait pula dengan aspek kultural dan struktural pada masyarakat Bali. Kondisi ini digunakan oleh elite politik pusat dan daerah untuk membangkitkan naluri kekerasan, mengalahkan pikiran (*manah*), budi (*buddhi*) dan kesadaran sehingga kemunculan kekerasan tidak terhindarkan.

Kekerasan fisik semakin menurun, terlihat pada pilkada, pilgub, dan pemilu 2009. Partai politik yang ikut pesta demokrasi sangat beragam, tidak saja partai yang berbasis kebangsaan, tetapi partai yang berbasis keagamaan. Gejala ini bermakna, bahwa demokrasi, termasuk di dalamnya multikulturalisme sebagai asas NKRI maupun masyarakat Bali, semakin mengakar pada masyarakat Bali. Namun di balik kesuksesan itu, ada gejala yang menarik, yakni penggunaan masimakrama sebagai strategi

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT
KEMENTERIAN
KEMERDEKAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

untuk meraih kemenangan. Masimakrama dimaknai secara denotatif dan konotatif. Secara denotatif berarti silaturahmi, sedangkan secara konotatif berarti elite politik berpilantropi (meningkatkan modal budaya/citra diri) berbentuk uang dan atau materi (modal ekonomi) kepada desa pakraman, banjar/dusun, dadia, seka, subak, dll., dengan harapan mendapatkan dukungan suara pada saat pemilu.

Makna konotatif menarik didekonstruksi, sebab di baliknya ada permainan kekuasaan, ideologi, hasrat, dan resistensi. Hal ini berkaitan dengan adanya kenyataan, bahwa masimakrama digunakan oleh desa pakramana, banjar, dadia, dll., untuk mengalihkan modal sosial menjadi modal ekonomi (finansial). Elite politik memenuhinya, karena mereka amat membutuhkan suara rakyat guna memenuhi syahwat kekuasaannya. Akibatnya, terjadi pembalikan struktur, yakni bukan elite politik yang menguasai dan mengeksploitasi rakyat, melainkan elite politiklah yang dikuasai dan dieksploitasi oleh rakyat. Pembalikan struktur terkait pula dengan ideologi yang dianut oleh kedua belah pihak, yakni ideologi pasar yang melihat, bahwa hubungan mereka bersifat jual-beli (patuh pada logika pasar). Pembalikan struktur bisa pula dimaknai sebagai resistensi rakyat terhadap elite politik yang dianggap belum secara optimal mewujudkan cita-cita ideal dalam kegiatan politik yang bersendikan demokrasi, yakni kesejahteraan bagi rakyat.

Dengan demikian, di satu sisi kekerasan fisik pada pesta demokrasi di Bali memang menurun, namun di sisi yang lain muncul kekerasan baru, yakni kekerasan simbolik dan kekerasan ekonomi yang bertopengkan masimakrama. Elite politik menggunakan kata masimakrama untuk menutupi syahwat kekuasaannya. Sebaliknya, rakyat memakai kata masimakrama sebagai topeng untuk menutupi kekerasan ekonomi (meminta sumbangan atau bantuan secara halus dan atau terang-terangan) terhadap elite politik. Namun, apapun bentuk kekerasan merupakan virus yang bisa menular pada orang lain. Misalnya, keberhasilan simakrama pada suatu desa pakraman akan menulari desa pakraman lainnya, sehingga kekerasan ekonomi berkembang biak secara luas. Kekerasan ekonomi yang menimpa elite politik bisa menular ke keluarganya - nafkah terbengkalai. Kekerasan ekonomi bisa pula beralih menjadi kekerasan fisik terhadap orang lain dan atau terhadap dirinya sendiri - elite politik bunuh diri. Setelah elite politik menduduki posisinya, maka virus kekerasan ekonomi bisa melahirkan kekerasan ekonomi, yakni korupsi yang berujung pada kekerasan terhadap rakyat.

Kekerasan ekonomi kelihatannya memang menguntungkan, namun daya tularnya yang luas dan berantai, bisa menunculkan dampak yang tidak diinginkan dalam konteks pengembangan demokrasi. Karena itu, pengembangan demokrasi yang sehat tidak hanya terpaku pada peniadaan kekerasan fisik berasaskan multikulturalisme, melainkan harus pula disertai dengan peniadaan aneka bentuk kekerasan lainnya, yakni kekerasan ekonomi, simbolik, dan psikologis, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Pencapaian sasaran ini membutuhkan kerjasama yang bersinergi antara negara, partai politik, media massa dan berbagai komponen masyarakat sipil atas dukungan rakyat. Berkenaan dengan itu maka desa pakraman sebagai komponen masyarakat sipil yang telah mengenal tradisi demokrasi, bisa berperan penting untuk menumbuhkembangkan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Untuk itu, desa pakraman dan aneka organisasi sosial yang bernaung di dalamnya, sebaiknya menjauhi aneka bentuk kekerasan. Sebab, kekerasan adalah virus yang bisa menularkan kekerasan pada orang maupun lembaga yang berujung pada pencederaan terhadap demokrasi.

— *** —

Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Bali Dalam Menyikapi Keberagaman

I. B. G. Pujaastawa

Sebagian besar penduduk Pulau Bali terdiri dari suku-bangsa Bali yang merupakan satu kesatuan sosial dengan ciri-ciri identitas kebudayaan yang sama, yakni kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Berkaitan dengan struktur majemuk masyarakat Indonesia, pada tataran mikro, penduduk Bali tersegmentasi ke dalam beberapa kelompok etnik, di mana suku-bangsa Bali menempati posisi sebagai kelompok mayoritas. Pada tataran meso, suku-bangsa Bali merupakan sebuah sistem sosial-budaya yang memiliki ciri-ciri identitas kultural yang berbeda dengan suku-bangsa lainnya sebagai bagian integral dari sistem sosial-budaya Indonesia yang bersifat bhineka tunggal ika. Pada tataran makro, suku-bangsa Bali merupakan bagian dari mosaik suku bangsa sejagat yang kebudayaannya cukup termasyur dan dikagumi dunia.

Dalam menyikapi perbedaan pada tataran mikro, sebagai kelompok etnik mayoritas sekaligus berperan sebagai tuan rumah, orang Bali sejak lama telah mengembangkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap kehadiran kelompok sosial lainnya dengan identitas kultural yang beragam. Secara historis, sikap menghargai perbedaan sebagaimana tertuang dalam semangat multikulturalisme, di antaranya ditunjukkan dalam bentuk kebijakan raja-raja Bali memberikan hak konsensi bermukim kepada kelompok etnik pendatang disertai jaminan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak kultural mereka. Sikap menghargai perbedaan ini kian dimantapkan sejalan dengan perkembangan sektor pariwisata yang memosisikan Bali sebagai terminal perjumpaan antarkebudayaan. Ibarat peribahasa "ada gula ada semut", gemerlap kepariwisataan Pulau Dewata tidak saja menarik minat para wisatawan, tetapi juga merangsang kehadiran kaum migran dari berbagai daerah untuk berebut rezeki di daerah ini. Akibatnya, Pulau Bali yang sejak dulu dikenal sebagai "surga" bagi wisatawan, kini juga menjadi "surga" bagi para pendatang. Oleh sejumlah pihak hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan horizontal yang disebabkan oleh perebutan sumber-sumber ekonomi dan perbedaan identitas kultural. Namun demikian, di tengah merebaknya konflik dan kekerasan bernuansa SARA yang melanda beberapa daerah di tanah air, kondisi keamanan di Bali relatif tetap kondusif. Meskipun serangan teroris dalam tragedi Bom Bali I dan II sangat melukai perasaan orang Bali, namun hal tersebut lebih disikapi dengan mawas diri. Tragedi tersebut dianggap lebih bersumber pada kelalaian, keteledoran, kesombongan, dan sederet kelemahan orang Bali lainnya. Sikap introspeksi ini terbukti mampu menghindarkan Bali dari ketegangan-ketegangan horizontal yang bernuansa SARA.

Sikap-sikap seperti dikemukakan di atas merupakan bagian dari tipikal kepribadian orang Bali yang senantiasa berupaya menjaga keseimbangan, kedamaian, dan keharmonisan dalam keberagaman. Sikap semacam itu pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang antara lain tertuang dalam konsep-konsep "ahimsa" (tidak melakukan kekerasan), "tat twam asi" (engkau adalah aku), "angawe sukaning wong len" (berbuat untuk kebahagiaan orang lain), dan sederet ungkapan lainnya yang mengandung semangat multikulturalisme.

Jika pada tataran mikro orang Bali sejak lama telah menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap kelompok budaya yang berbeda (pendatang), namun pada tataran meso, sebagai kelompok budaya minoritas di negeri ini, orang Bali kini justru merasa identitas kulturalnya

mulai terancam. Berkembangnya wacana "Ajeg Bali" dan penolakan terhadap rencana pembangunan Jembatan Jawa-Bali dan RUU APP merupakan bentuk-bentuk resistensi terhadap hegemoni rezim penguasa dan pengusaha yang dikhawatirkan dapat mengancam identitas kultural mereka.

Sementara dalam menyikapi perbedaan pada tataran makro, terkait dengan keberadaan Bali sebagai bagian dari mosaik kebudayaan dunia yang cukup dikagumi, orang Bali lebih dikenal menunjukkan sikap ramah-tamah dan penuh toleransi. Kehadiran budaya wisatawan dan budaya pariwisata dengan sistem nilainya tersendiri lebih dipandang sebagai pembawa anugerah daripada musibah.

— *** —

*Mengelola dan Memanfaatkan Keberagaman Budaya Bali
Untuk Pembangunan Pariwisata*

Ida Dewa Gede Ngurah Swastha, SH.

Indonesia yang merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republic adalah Negara kepulauan (Nusantara) yang terdiri dari berbagai suku, agama sehingga sangat kaya dengan keberagaman adapt budaya. keberagaman suku, agama, adat, bahasa dan sebagainya yang menciptakan keberagaman budaya sebenarnya adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya terutama apabila dikaitkan dengan kepariwisataan yang sangat diharapkan sebagai unsure penting pembangunan ekonomi Indonesia. Keberagaman suku, agama,, adat dan budaya ini dilindungi dan dikelola oleh Negara dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang berdasar Pancasila.

Bali yang dilindungi oleh NKRI sehingga menjadi pendukung setia NKRI, budaya dengan keberagamannya yang luar biasa dan menakjubkan adalah kekayaan bangsa dan Negara Indonesia yang tentunya juga tak ternilai harganya sehingga selalu harus dipelihara, dipertahankan, dikelola dan dibangun dengan sebai-bainya. Kebudayaan Bali itu sendiri adalah kebudayaan yang sangat lengkap dan sangat kaya. Semua unsure kebudayaan di Bali sangat kaya dengan keragaman isi, jenis dan bentuknya. Kebudayaan

Bali yang kaya, yang adi luhung yang kaya didukung oleh alam yang kaya, asri dan indah didukung oleh adat,, karakter dan tata karma, manusianya menjadikan Bali beserta isinya dicintai dan dirindukan oleh dunia yang akhirnya menjadikan Bali sebagai tujuan wisata terfavorit di dunia. Kemajuan wisata Bai ini tak pelak lagi adalah karena budayanya yang adiluhung dan kaya dengan keberagaman, karena karunia alam dari Tuhan dank arena karakter dan tata karma manusanya.

Dengan demikian maka ola dasar pembangunan Bali yang berwawasan lingkungan, berbudaya berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang dijiwai oleh nilai agama Hindu serta konsep pariwisata budaya harus dipertahankan, diteruskan dan dibangun. Dalam kerangka ini maka Perda Tata Ruang akan menjadi sesuatu yang super penting karena sangat strategis.

Keberhasilan memelihara budaya, alam, keamanan, karakter manusianya, kelancaran lalu lintas (yang disebut ajeg Bali), yang kalau didukung oleh stabilitas keamanan dan ekonomi global yang baik, maka pariwisata Bali ke depan akan semakin maju bahkan dengan pesat. Hal ini tentunya akan menjadi inspirasi pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Profil Pemakalah

I GDE PARIMARTHA (Prof. Dr. MA) dilahirkan di Karangasem pada tanggal 31 Desember 1943. Memperoleh gelar sarjana sejarah (Drs) dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada tahun 1980, MA dalam bidang Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1984), dan doktor (Dr) dari Social Science, Free University Amsterdam tahun 1995 dengan disertasi berjudul *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915* (diterbitkan oleh KITLV Jakarta bekerjasama dengan Penerbit Djambatan, 2005). Pernah bekerja sebagai Petugas Lapangan (*Group Leader*) BKKBN Kabupaten Badung (1972-1975). Tahun 1976-1982 menjadi Asisten Dosen pada Fakultas Sastra Universitas Udayana dan setahun kemudian (1983) diangkat sebagai dosen tetap hingga sekarang. Pernah menjabat Ketua Jurusan Sejarah (1988- 1990); Ketua Pusat Kebudayaan dan Kepariwisata (2001-2003) dan Ketua Program Pendidikan Doktor Kajian Budaya (2003-2008).

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkannya, antara lain; "Desa Adat (Pakraman) dari Perspektif Sejarah", *Pecalang, Perangkat Keamanan Desa Pakraman* di Bali (Denpasar: LPM Universitas Udayana, 2004); "Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa Pakaman di Bali: Tinjauan Historis Kritis", dalam I Wayan Ardika & Darma Putra (eds.), *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. (Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press, 2004); "Otonomi Daerah dan Multikulturalisme. Studi Mengenai Masyarakat Nusa Tenggara Barat", *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat* (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005); "Sistem Pemerintahan Desa di Daerah Bali", *Bali Bangkit Kembali* (Jakarta: Kerjasama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Universitas Udayana, 2006); "Budaya Rohani dan Peranannya Dalam Kehidupan Sosial (Suatu Tinjauan Sejarah)", *Membangun Budaya Rohani Menuju Keluhuran Budi*. (Denpasar: Pemerintah Propinsi Bali Sekretaris Daerah, 2006); "Potret Kemiskinan Desa Pakraman", Legawa Partha, I Gde Parimartha (ed.), *Program CBD Bali Sejahtera* (2007). E-mail: S2kjbdyunud yahoo.com

NENGAH BAWA ATMADJA (Prof. Dr. M.A) lahir di Tabanan pada tanggal 17 Pebruari 1951. Gelar sarjana pendidikan (Drs) diperoleh dari IKIP Malang tahun 1975, MA (1992) dan Dr (1998) dalam bidang Antropologi dari Universitas Indonesia. Mulai mengajar di SMA dan IKIP Saraswati Tabanan,

Bali dari tahun 1975 hingga 1982. Sejak tahun 1979 sampai sekarang menjadi tenaga pengajar pada Jurusan Pendidikan Sejarah dan Program Pascasarjana Undiksha; Program S2 dan S3 Kajian Budaya (1990-sekarang), dan Kajian Pariwisata Pascasarjana Universitas Udayana (2000-sekarang); Program S2 Pascasarjana IHDN (Institut Hindu Dharma Negeri) Denpasar- Jurusan Brahma Widya dan Pendidikan Agama Hindu (2000-sekarang); Program S2 dan S3 Pascasarjana UNHI (Universitas Hindu Indonesia) Denpasar - Jurusan Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu. Pernah menjadi Pembantu Rektor II Undiksha (2002-2006). Kini tercatat sebagai Guru Besar Antropologi Unirvesitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dan Asisten Direktur II Pascasarjana di universitas yang sama.

Telah menulis beberapa buku dan artikel ilmiah, antara lain; 1). *Teori Kritis dalam Kajian Budaya*. (Denpasar: Penerbit S3 Kajian Budaya Universitas Udayana, 2008); 2). *Ngalih Gae Ngutang Gae: Pemaknaan Pesta Demokrasi pada Akar Rumput*. (Denpasar: S2/S3 Kajian Budaya Universitas Udayana, 2008); 3). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. (Singaraja: Pascasarjana Undiksha, 2008); 4). *Bali pada Era Globalisasi Pulau Seribu Pura tidak Seindah Penampilannya*. (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2009); 5). *Pemanfaatan Modal Budaya dan Modal Tubuh Menjadi Modal Ekonomi Berbentuk Hiburan Seks Melalui Rangsangan Mata Kasus Joged Bumbung Ngebor di Buleleng Bali* (Denpasar: Penerbit S2/S3 Kajian Budaya Unud, 2009); 6). *Penyertaan Modal Sosial dalam Pengembangan Pariwisata pada Kawasan Pariwisata Ubud* (Penelitian Strategis Nasional sedang berlangsung, 2009); 7). *Beringin Tumbang dan Pura Ajek di Tengah Ribuah Masjid (Keruntuhan Majapahit, Islamisasi dan Pemertahanan Agama Hindu Berbasis Multikulturalisme pada Masyarakat Bali* (Rancangan buku siap cetak).

I.B.G. PUJAASTAWA (Drs,M.A) adalah dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, dan Sekretaris Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata di universitas yang sama. Dilahirkan di Denpasar pada tanggal 18 November 1962. Gelar sarjana (Drs) diraih dari Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, dan Magister (MA) dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Selama lima tahun terakhir ini telah melakukan berbagai penelitian (baik mandiri maupun kelompok) dan menulis sejumlah artikel yang tersebar di beberapa jurnal ilmiah.

Di antara penelitian dan tulisan terpenting, adalah; Pujaastawa, IBG., dkk. *Persepsi, Sikap, dan Prilaku Orang Bali Terhadap Migran dan Transmigrasi*. Kerjasama Badan Kependudukan Daerah Bali dengan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unud (2004), *Konversi Hutan dari Perspektif Determinisme Penduduk Studi Kasus*

Konversi Hutan Adat di Desa Taro, Gianyar (2004), Studi Identifikasi Potensi dan Alternatif Model Pengembangan Kepariwisata di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan (2004), Kajian Pemantapan Multikulturalisme di Provinsi Bali Fokus Faktor Budaya dan Adat dalam Menyikapi Perbedaan. Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian Universitas Udayana (anggota tim, 2005); Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Bali. Kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Puslit Kebudayaan dan Kepariwisata Unud (2005), Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus (ODTWK) Provinsi Bali. Kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Puslit Kebudayaan dan Kepariwisata Unud (2006), Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana (2006), Kajian Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Unggulan di Luar Jawa-Bali. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2006), Kontribusi Pariwisata Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (2007), Survey Karakteristik Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Bali. Kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana (2008). Penelitian mandiri, di antaranya adalah; Pariwisata Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Berdimensi Kerakyatan: Studi Kasus Pengelolaan Obyek Wisata Alas Kedaton, di Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali (2006), Kearifan Lokal di Balik Mitos Lembu Putih di Desa Taro, Gianyar. Dibiayai dari dana DIPA Universitas Udayana Tahun Anggaran 2006.

Publikasi ilmiah terpilih selama lima tahun terakhir; "Dinamika Konflik di Tengah Transformasi Kebudayaan Bali", *Dinamika Kebudayaan* Jurnal Ilmiah Terakreditasi Dirjen Dikti Depdiknas No.234/DIKTI/Kep/2004. Vol.VI No.2. 2004; "Tri Hita Karana: Kearifan Lokal dengan Nilai-Nilai Universal", *Wawasan Budaya untuk Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal*. Penerbit : Pilar Politika Kelompok *Pilar Media, Yogyakarta, 2004*. ISBN : 979-98732-1-5. *Pariwisata Terpadu Alternatif Model Pengembangan Pariwisata Bali Tengah.*: (Universitas Udayana, 2005. ISBN : 979-8286-11-1). "The Empowerment of Traditional Institution in Cultural-Based", *Possibility of Sustainable Cities and The Problems of International and Intellectual Exchange*. Editors Prof. I Gede Putu Wirawan, Ph.D. dan Prof. Naoki Yoshihara, Ph.D. (Penerbit Universitas Udayana, 2005. ISBN : 979-8286-14-6).

Editor buku *Wacana Antropologi: Kusumanjali untuk Drs I Wayan Geriya*. (Denpasar: Pustaka Larasan. 2006. ISBN : 979-3790-14-8). "Konstituensi, Kompetensi, dan Integritas: Problematika Modus Vivendi Demokrasi Indonesia", *Antropologi: Kusumanjali untuk Drs I Wayan Geriya*. (Denpasar : Pustaka Larasan, 2006. ISBN : 979-3790-14-8). "Anarki Kapitalisme dalam Pariwisata", *Wacana Antropologi: Kusumanjali untuk Drs I Wayan Geriya*. (Denpasar : Pustaka Larasan, 2006. ISBN : 979-3790-14-8). "Implementasi Tri Hita Karana dalam Kependudukan/ Demografi: Realitas dan Rekomendasi Kebijakan", Bali is Bali Forever Ajeg Bali *Bingkai Tri Hita Karana*. (Bali Travel News bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, 2007. ISBN : 979-25-9980-0). "Pariwisata Berbasis Kerakyatan", *Kerja Sosial di Tampak Siring*. Editor Wayan P. Windia. (Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 2007. ISBN : 978-979-99485-3-3). "Melacak Prinsip-prinsip Solidaritas Antaragama Menuju Tatanan Masyarakat Indonesia Multikultural", *Kebudayaan dan Modal Budaya Bali dalam Teropong Lokal, Nasional, Global*. Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, MS (editor). Denpasar: Widya Dharma. 2008. Bersama Agung Suryawan, dan Preantjaja, menjadi editor *Analisis Kebutuhan Transportasi dan Akomodasi dan Transportasi Pariwisata di Bali*. (Pusat Kebudayaan dan Kepariwisataan Unud bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2008).

Menjadi penyaji, narasumber, dalam seminar dan lokakarya antara lain; Tri Hita Karana : Kearifan Lokal dengan Nilai-Nilai Universal. Makalah Lokakarya Nasional Pembangunan Berwawasan Budaya. Kerjasama Pusat Studi UGM dan Program S2 Kajian Budaya Universitas Udayana. Denpasar, 29 Januari 2004. Tri Hita Karana Socialization. Deputy Minister for Cultural and Tourism Resources Development Departement of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia. Held in Puri Bagus Candidasa, Karangasem Bali, 2005 (narasumber). Pariwisata Berwawasan Tri Hita Karana. Makalah disampaikan dalam Sosialisasi dan Implementasi Tri Hita Karana bagi Karyawan Hotel diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Medan, 22-23 Desember 2005. Menata Pawongan Bali melalui Pengelolaan Kependudukan Berbasis Sinergi Desa Dinas dan Desa Pakraman. Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional "Ajeg Bali Tantangan dan Peluang Ajeg Bali dalam Era Global". Kerjasama Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar, Forum Masyarakat Peduli Bali Jawa Timur, Kelompok Media Bali Post, dan Pemerintah Provinsi Bali. Denpasar, 8 Oktober 2005. Instrumen Penilaian Objek dan Daya Tarik Wisata Unggulan di Luar Jawa dan Bali. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Unggulan di Luar Jawa dan Bali. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana. Denpasar, 10 Desember 2006. Obyek Wisata Alas Kedaton: Model Pengelolaan Ekowisata Berbasis Adat. Makalah disampaikan pada Pelatihan Ekowisata Tingkat Nasional diselenggarakan oleh Bali Tourism Board bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana. Sanur, Denpasar, 25-26 Agustus 2006. Pelatihan Ekowisata Nasional. Kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana, dan Bali Tourism Board. Hotel Inna Sindhu Beach Sanur, Bali, 25-26 Agustus 2006. (narasumber).

Hegemoni dan Perlawanan : Perlawanan terhadap Hegemoni Penguasa dan Pengusaha di Bali). Makalah dipresentasikan dalam Matrikulasi Program Studi magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana. Denpasar, 23 Agustus 2007. Masalah-masalah Sosial-Budaya dalam Pengembangan Pariwisata. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Menggali dan Mengelola Potensi Wisata Bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Program Studi Pariwisata Universitas Udayana. Denpasar, 5-10 September 2007. Pariwisata Berbasis Kerakyatan. Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional Penyusunan Pola Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Wisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, 9 Desember 2007. Di Balik Berkah Pariwisata (Tinjauan Seputar Transformasi Kebudayaan Bali). Makalah Disajikan pada Seminar Budaya Dalam Rangkaian Festival Budaya Udayana 2008. Denpasar, 26 September 2008. Pariwisata dan Kebudayaan Etnik. Materi disajikan dalam Kursus Sertifikasi Pramuwisata Madya Angkatan IV yang diselenggarakan atas kerjasama UNHI Denpasar dengan DPD HPI Bali. Denpasar, 25 April 2008. Evaluasi Penerapan Tri Hita Karana di Lingkungan Hotel dan ODTW (Bidang Parhyangan). Makalah dipresentasikan dalam Pelatihan Tri Hita Karana untuk Kalangan Pemangku Pepentingan Pariwisata Bali. Denpasar, 4 Maret 2008. Pola Pengembangan Pariwisata Terpadu Bertumpu Pada Model Pemberdayaan Masyarakat. Makalah dipresentasikan dalam Pelatihan dan Magang SATKER Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha NAD-Nias. Bali, 9 Maret 2008. Pariwisata Budaya. Materi disajikan dalam Kursus Sertifikasi Pramuwisata Angkatan VII. Kerjasama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dengan Himpunan Pramuwisata (HPI) Bali. Denpasar, 16 Februari 2009. Workshop Jurnalistik SMA/SMK se Bali dengan Tema "PR Bagi Legislator". Denpasar, 8 Maret 2009. (Narasumber)

IDA DEWA GEDE NGURAH SWASTHA (SH), aktivis dan pemerhati masalah hukum, politik, agama, dan sosial budaya. Menjadi ketua pada beberapa organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan, di antaranya; *Air Traffic Controller Indonesia* (HATCI) (1987-1990), Forum Pemerhati Hindu Dharma Pusat (1994-2002), Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Bali 2003 dan 2008, dan President *Bali Flying Club* (2004-2008). Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali (2008-sekarang). Anggota Litbang Parisada Hindu Dharma Pusat (1996-2001). Anggota Lembaga Pengkajian Budaya Bali/*Society for Balinese Studies* (SBS). Anggota Panitia Pengawas Pemilu Denpasar (1999). Nayaka Majelis Utama Desa Pakraman Bali (2004-2009), Anggota Badan Koordinasi Pengamanan Bali (BKPB) (sejak 2006), dan Penasehat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Denpasar (2008-sekarang). Menerima penghargaan *Lempad Prize* dari Sanggar Dewata Indonesia tahun 1998.

Tugas Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Staf Ahli Menteri merupakan unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Staf Ahli Menteri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata. Staf Ahli Menteri terdiri dari empat orang dan mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Staf Ahli Bidang Multikultural mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai multikultural
2. Staf Ahli Bidang Pranata Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pranata sosial
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga
4. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi

JADWAL ACARA

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
Bali : Rabu, 5 Agustus 2009		
08.00-08.15	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan : • Sambutan Staf Ahli Menteri Bidang Multikultur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. • Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata • Pembacaan Do'a 	MC Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM Drs. Wardiyatmo, M. Sc. Drs. M. Alimuddin
08.15-09.45	<i>Nara Sumber</i> : Dr. Risman Musa <i>Potret dan Prospek Pengembangan Masyarakat Multikultur di Bali.</i>	Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM Notulen: Dra. Sitti Muningggar
09.45-10.00	Rehat/Coffee Break	Panitia
10.00-11.30	Sesi I : Keynote Speaker : Prof. Dr. I Gde Parimartha, MA. <i>Revitalisasi Kebudayaan Dalam Masyarakat Multikultur: Ajeg Bali Dalam Bingkai NKRI</i>	Moderator : Drs. I Made Purna, M.Si. Notulen : Titik Umi Kurniawati , S.Sos
11.30-12.15	1. Drs. I. B. G. Pujaastawa, MA. <i>Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Bali Dalam Menyikapi Keberagaman</i>	
12.15-13.00	Ishoma	Panitia
13.00-13.45	Sesi II : 1. Prof. Dr. I Nengah Bawa Atmadja, MA. <i>Demokrasi dan Pemilihan Umum Tanpa Kekerasan: Perspektif Multikulturalisme pada Masyarakat Bali</i>	Moderator : Drs. I Made Purna, M.Si. Notulen : Titik Umi Kurniawati , S.Sos
13.45-15.15	2. Ida Dewa Gede Ngurah Swastha, SH. <i>Pariwisata Bali: Mengelola dan Memanfaatkan Keragaman Budaya untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	
15.15-15.30	Rehat/Coffee Break	Panitia
15.30-17.00	Perumusan	Tim Perumus
17.00-18.30	Pembacaan Rumusan Seminar	Ketua Tim Perumus
18.30-18.40	Penutupan	Dra. Sri Rahayu B, MM

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
JENDRAL SEJARAN DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

Catatan:

STAF AHLI MENTERI BIDANG MULTIKULTURAL
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Gedung Sapta Pesona Lt. 12
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta-10110

PER

**Perpustakaan
Jenderal**